



PEMERINTAH
KABUPATEN
LUMAJANG



01

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH & OTONOMI DAERAH

Dipersembahkan oleh: Bagian Tata Pemerintahan



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

LUMAJANG
EKSOTIK



Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

PENGERTIAN



- Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah adalah pembagian kewenangan, tanggung jawab, serta sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Tujuannya adalah untuk mendorong kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan.





DASAR HUKUM



- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 – 18B
- UU No. 23 Tahun 2014 (Pemerintahan Daerah)
- UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- PP No. 7 Tahun 2008 (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)
- UU No. 6 Tahun 2014 (Desa)





PEMERINTAH
KABUPATEN
LUMAJANG

PRINSIP HUBUNGAN



04

Desentralisasi

pelimpahan kewenangan ke daerah

Dekonsentrasi

pelimpahan wewenang administratif ke pejabat pusat di daerah

Tugas Pembantuan (Medebewind)

penugasan pusat ke daerah atau sebaliknya





Bentuk Hubungan



- Hubungan Politik dan Administratif
- Hubungan Kewenangan (Absolut, Konkuren, Umum)
- Hubungan Keuangan (DAU, DAK, DBH, PAD)
- Hubungan Pengawasan (Evaluasi dan Pembinaan)



Pembagian Urusan Pemerintahan



Urusan Absolut (Pusat)

Politik luar negeri, pertahanan, moneter, agama, yustisi

Urusan Konkuren

Wajib Pelayanan Dasar : Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman, Ketibum dan Linmas; dan Sosial.

Wajib Pelayanan Non Dasar : Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Admin. Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masy. Dan Desa; Pengendalian Penduduk dan KB; Perhubungan, Kominfo; Koperasi dan UKM; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olah Raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.

Pilihan : Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.

Urusan Umum

Tugas Presiden secara nasional



Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan



Urusan Konkuren

Berdasarkan Pasal 11 PP Nomor 13 Tahun 2019

- wali kota menyampaikan LPPD kabupaten/ kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- LPPD sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Penyampaian LPPD sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui sistem informasi elektronik secara daring.



**PEMERINTAH
KABUPATEN
LUMAJANG**

• • •

Kewenangan Pemerintah

07



Pusat

- Menentukan kebijakan nasional
- Menetapkan standar pelayanan minimal (SPM)
- Mengawasi daerah
- Menetapkan batas wilayah

Daerah

- Menyusun Perda & APBD
- Mengelola layanan publik
- Mengatur rumah tangga daerah





Perimbangan Keuangan →

- DAU (Dana Alokasi Umum): Pemerataan kemampuan keuangan
- DAK (Dana Alokasi Khusus): Pendanaan prioritas nasional
- DBH (Dana Bagi Hasil): Dari pajak/ SDA ke daerah penghasil
- PAD (Pendapatan Asli Daerah): Pajak daerah, retribusi, usaha
- Dana Desa: Transfer dari pusat ke desa





**PEMERINTAH
KABUPATEN
LUMAJANG**

...

09

Peran Gubernur dan Tujuan Otonomi

Gubernur

- Koordinasi antar kabupaten/kota
- Wakil pusat di provinsi
- Laporan ke Presiden/Kemendagri

Tujuan Otonomi

- Pelayanan publik lebih efektif
- Pemberdayaan masyarakat
- Peningkatan kesejahteraan
- Partisipasi masyarakat
- Pemerataan pembangunan





Tantangan dan Solusi



Tantangan:

- Ketimpangan fiskal
- Kewenangan tumpang tindih
- Lemahnya SDM dan akuntabilitas

Solusi

- Peningkatan kapasitas ASN
- Koordinasi lintas sektor
- Sistem pengawasan yang transparan
- Evaluasi dan pengawasan berkelanjutan



Kesimpulan →

- Hubungan pusat dan daerah memperkuat sistem pemerintahan NKRI.
- Desentralisasi menjadi instrumen utama dalam membangun pemerintahan yang partisipatif, efektif, dan merata.
- Kerja sama dan sinergi antar tingkat pemerintahan adalah kunci keberhasilan.



PEMERINTAH
KABUPATEN
LUMAJANG



10

Sekian Presentasi ini

Terima Kasih

Dipersembahkan oleh: Bagian Tata Pemerintahan

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

LUMAJANG
EKSOTIK